

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Sasaran Strategis	1. Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2. Optimalnya Upaya Penanganan Kriminalitas		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
	2	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	80%
	3	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	70%
	4	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%
	5	Persentase penurunan konflik sosial	90%
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan strategis: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</p> <p>Sasaran Strategis: Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban</p> <p>IKU Strategis: Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>Program - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama</p>		



Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.Pembina Tingkat I/IVa
NIP. 19720313 199603 1 002

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Sasaran Strategis	1. Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2. Optimalnya Upaya Penanganan Kriminalitas		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
	2	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik	80%
	3	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	70%
	4	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi,	100%
	5	Persentase penurunan konflik sosial	90%
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
	Sasaran Strategis: Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban		
	IKU Strategis: Persentase penurunan konflik sosial		
	Program : - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		

Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,**Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.**

Pembina Tingkat I/IVa

NIP. 19720313 199603 1 002

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%
	2	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	75%
	3	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	69%
	4	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%
	5	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa		

Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
	2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		
	3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
	4. Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama		
	5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%
	2	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	75%
	3	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	69%
	4	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%
	5	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</p> <p>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>		

Denpasar, 3 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadia, S.E.
Pembina Tingkat I/IVa
NIP. 19720313 199603 1 002



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%
	2	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	75%
	3	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	69%
	4	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%
	5	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		

Denpasar, 3 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,



PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	: Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025		
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%
	2	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	75%
	3	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	69%
	4	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%
5	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80%	
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama		

Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,**Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.**Pembina Tingkat I/IVa
NIP. 19720313 199603 1 002

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
OPD yang Dinilai	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Sumber Data	: Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar Tahun 2025		
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja 2025) dan Kegiatan Utama	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
	2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		
	3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
	4. Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama		
	5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%
	2	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	75%
	3	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	69%
	4	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100%
	5	Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	80%
Program, Kegiatan, dan keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Keluaran/Hasil Kegiatan : Persentase Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		

Denpasar, 3 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar

Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.

Pembina Tingkat II/IVa
NIP. 19720313 199603 1 002



**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali										
Nama OPD	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
Tahun Penilaian	: 2025										
Periode yang dinilai	: Periode RENSTRA Tahun 2021-2026										
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat										
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Tujuan: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat										
	Sasaran: Berkurangnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemantapan pelaksanaan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Munculnya ideologi anti Pancasila	RSO.25.05.33.01	Kepala Badan Kesbangpol	-Faktor Internal Kurangnya Pemahaman terhadap Pancasila: Banyak masyarakat, terutama generasi muda.	Eksternal	C	- Dampak Negatif Ideologi anti-Pancasila dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat	Masyarakat Kota Denpasar	
		Persentase terlaksananya Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta	Keterlambatan dalam proses pencairan dana bantuan keuangan partai politik	RSO.25.05.33.02	Kepala Badan Kesbangpol	Kesalahan administrasi: Kesalahan dalam pengisian formulir, perhitungan, atau penginputan data dapat menyebabkan penundaan.	Internal	C	Terlambatnya pelaksanaan kegiatan partai politik	Partai politik	
		Persentase terlaksananya Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Data Organisasi Kemasyarakatan tidak lengkap	RSO.25.05.33.03	Kepala Badan Kesbangpol	Terbatasnya tenaga kerja yang dimiliki dalam rangka pendataan ormas	Internal	C	- Ormas ilegal: Ormas yang tidak terdaftar secara resmi berpotensi dianggap sebagai organisasi ilegal. Hal ini dapat	Masyarakat Kota Denpasar	
		Persentase terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama	Sosialisasi terkait bahaya narkoba tidak dapat menjangkau seluruh SMP yang ada di Kota Denpasar	RSO.25.05.33.04	Kepala Badan Kesbangpol	Terbatasnya tenaga kerja yang ada dikantor	Internal	C	Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba: - Coba-coba: Pelajar yang kurang informasi tentang bahaya	Masyarakat Kota Denpasar	
2	Tujuan: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat										
	Sasaran: Optimalnya Upaya Penanganan Kriminalitas	Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat	Masih terjadinya kasus konflik sosial di Kota Denpasar	RSP.25.05.33.01	Kepala Badan Kesbangpol	Penyebab Kenaikan Konflik Sosial Konflik sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Namun, peningkatan frekuensi dan intensitas	Internal	Internal dan Eksternal	Dampak Peningkatan Konflik Sosial di Daerah antara lain : - Kerugian Materiil - Kerugian Immaterial - Dampak Lingkungan - Dampak Politik - Dampak Sosial	Masyarakat Kota Denpasar	

Denpasar, 3 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

Anak Agung Nguran Gede Darma Putra Atmadja, S.E.

Pembina Tingkat II/IVa
NIP. 19720313 199603 1 002

No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penatausahaan	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.05 33.01	Sekretaris Badan	Keterlambatan dalam penyusunan SPJ	Internal	C	Rendahnya realisasi anggaran	BKBP
2	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Penatausahaan	Tidak tersusunnya perencanaan yang sesuai dengan kinerja OPD	ROO.25.05 33.02	Sekretaris Badan	Ambiguitas atau ketidakjelasan dalam tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) seringkali muncul karena beberapa faktor, antara lain : - Dinamika situasi dan kondisi: Tugas Kesbangpol sangat dipengaruhi oleh	Internal	C	Dokumen perencanaan dapat tidak sesuai dengan target yang diharapkan	BKBP
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Penatausahaan	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.3 3.01	Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Penatausahaan	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.3 3.02	Perencana dan Pihak Ketiga	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Penatausahaan	Pemerasan pada pihak ketiga	RF.25.05.3 3.03	PPTK dan Pihak Ketiga	Kelemahan sistem pengendalian internal: Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Penatausahaan	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.3 3.04	PPTK dan Pihak Ketiga	- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen. Kesempatan. Adanya kesempatan untuk melakukan pemalsuan dokumen.	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penatausahaan	Kesalahan Hitung Gaji	ROO.25.05 33.03	Kasubbag Umum dan Keuangan	Kurangnya informasi dari bagian kepegawaian terkait kenaikan pangkat pegawai	Internal	C	Terjadi pergeseran anggaran untuk anggaran gaji	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penatausahaan	Gratifikasi proses kenaikan gaji berkala	RF.25.05.3 3.05	Kasubag Umum dan Keuangan	Terlambatnya proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	Internal	C	Kepercayaan kepada pelaku risiko berkurang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penatausahaan	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.3 3.06	Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penatausahaan	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.3 3.07	Perencana dan Pihak Ketiga	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penatausahaan	Pemerasan pada pihak ketiga	RF.25.05.3 3.08	PPTK dan Pihak Ketiga	Kelemahan sistem pengendalian internal: Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penatausahaan	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.3 3.09	Bendahara Gaji	- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen. Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan pemalsuan dokumen.	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan	Ketidaktepatan dalam Penganggaran	ROO.25.05 33.04	Kasubag Umum dan Keuangan	- Faktor Internal Kurangnya Perencanaan yang Matang: Perkiraan Pendapatan yang Tidak Akurat: Estimasi pendapatan yang terlalu optimis atau pesimis dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.	Internal	C	- Defisit Anggaran: Kondisi dimana pengeluaran melebihi pendapatan. - Kegagalan dalam Mencapai Tujuan: Program dan kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal. - Penurunan Kinerja Organisasi: Efisiensi dan efektivitas organisasi menjadi menurun.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.3 3.10	Kabag Umum dan Keuangan	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	UC	adanya potensi gratifikasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.3 3.11	Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.3 3.12	Perencana dan Pihak Ketiga	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan	Pemerasan pada pihak ketiga	RF.25.05.3 3.13	PPTK dan Pihak Ketiga	Kelemahan sistem pengendalian internal: Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.3 3.14	PPTK dan Pihak Ketiga	- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen. Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan pemalsuan dokumen.	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.25.05 .33.05	Kasubag Umum dan Keuangan	Terbatasnya kompetensi SDM yang memahami proses pengadaan barang/jasa per unit organisasi	Internal	C	Realisasi fisik pengadaan tidak mencapai target	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan	List belanja barang/jasa pada RKA tidak ada pada perwali SHB/SBJ	ROO.25.05 .33.06	Kasubag Umum dan Keuangan	Kurangnya koordinasi antar bidang di masing-masing perangkat daerah	Eksternal	UC	Terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan	List barang pada RKBM tidak lengkap	ROO.25.05 .33.07	Kasubag Umum dan Keuangan	Dalam penyusunan RKBM Perangkat Daerah tidak merefleksikan kondisi real kebutuhan pada Perangkat Daerah	Eksternal	UC	Terhambatnya pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.3 3.15	Kasubag Umum dan Keuangan	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	UC	adanya potensi gratifikasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan	Bekerjasama dengan pihak ketiga agar bisa terlibat dalam penyusunan Standar Satuan Harga	RF.25.05.3 3.16	Kasubag Umum dan Keuangan	Pihak ketiga yang dipilih hanya berdasarkan kedekatan dan bisa diajak kerjasama untuk pemenuhan kepentingan tertentu	Internal & Eksternal	C	In efisiensi anggaran yang menyebabkan kerugian negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan	Pemanfaatan Barang Milik Daerah berpotensi terjadi kecurangan	RF.25.05.3 3.17	Kasubag Umum dan Keuangan	Kegiatan dilakukan oleh pihak ketiga	Internal	C	1. Reputasi dari pelaku risiko terganggu 2. Timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.3 3.18	PPTK dan Pihak Ketiga	- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen. Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan pemalsuan dokumen.	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penatausahaan	Keterlambatan pencairan gaji non ASN	ROO.25.05 33.08	Kasubag Umum dan Keuangan	Keterlambatan penandatanganan gaji oleh non asn	Internal	C	Keterlambatan penerimaan gaji oleh non asn	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penatausahaan	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.3 3.19	Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penatausahaan	Pengelembungan Biaya	RF.25.05.3 3.20	Perencana dan Pihak Ketiga	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penatausahaan	Pemerasan pada pihak ketiga	RF.25.05.3 3.21	PPTK dan Pihak Ketiga	Kelemahan sistem pengendalian internal: Kurangnya pengawasan dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penatausahaan	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.3 3.22	PPTK dan Pihak Ketiga	- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen. Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan pemalsuan dokumen.	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penatausahaan	Keterlambatan dalam proses pemeliharaan barang yang tidak sesuai jadwal	ROO.25.05 33.09	Kasubag Umum dan Keuangan	Tidak terjadwalnya pemeliharaan masing-masing barang	Internal	C	Jangka waktu penggunaan barang semakin cepat karena rusak	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penatausahaan	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.3 3.23	Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penatausahaan	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.3 3.24	Perencana dan Pihak Ketiga	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penatausahaan	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.3 3.25	PPTK dan Pihak Ketiga	- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen. Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan pemalsuan dokumen.	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Pelaksanaan	Hujan saat pelaksanaan Hut Kota & Hut R.I	ROO.25.05 33.10	Kepala Bidang	Cuaca yang tidak dapat diprediksi	Eksternal	UC	Pelaksanaan HUT Kota dan HUT R.I terhambat	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Pelaksanaan	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.05 33.11	Kasubag Umum dan Keuangan	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Internal	C	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Pelaksanaan	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.3 3.26	Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Eksternal	UC	adanya potensi gratifikasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Pelaksanaan	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.3 3.27	Perencana dan Pihak Ketiga	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Pelaksanaan	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.3 3.28	PPTK dan Pihak Ketiga	- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen. Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan pemalsuan dokumen.	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar

	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Pelaksanaan	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.3 3.29		- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen. Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan pemalsuan dokumen.	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Penatausahaan	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.05 33.12	Kepala Bidang	Masih terjadi kesalahan dalam dokumen SPJ	Internal	C	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Penatausahaan	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.3 3.30	Kasubag Umum dan Keuangan	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	UC	adanya potensi gratifikasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Penatausahaan	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.3 3.31	Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Penatausahaan	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.3 3.32	Perencana dan Pihak Ketiga	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Penatausahaan	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.3 3.33	PPTK dan Pihak Ketiga	- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen. Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan pemalsuan dokumen, misalnya akses yang mudah ke sistem informasi atau kurangnya pengawasan, dapat meningkatkan risiko terjadinya fraud. Kebutuhan finansial: Motif finansial sering menjadi alasan utama seseorang melakukan pemalsuan.	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	Penatausahaan	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.05 33.13	Masih terjadi kesalahan dalam dokumen SPJ	Masih terjadi kesalahan dalam dokumen SPJ	Internal	C	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	Penatausahaan	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.3 3.34	Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	Penatausahaan	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.3 3.35	Perencana dan Pihak Ketiga	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	Penatausahaan	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.3 3.36	Kasubag Umum dan Keuangan	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	UC	adanya potensi gratifikasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah Ormas yang terdaftar dan aktif	Penatausahaan	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.3 3.37	PPTK dan Pihak Ketiga	- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	Penatausahaan	Terjadi keterlambatan dalam proses SPJ Barang dan Jasa	ROO.25.05 .33.14	Kepala Bidang	Masih terjadi kesalahan dalam dokumen SPJ	Internal	C	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	Penatausahaan	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.3 3.38	Kasubag Umum dan Keuangan	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	UC	adanya potensi gratifikasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	Penatausahaan	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.3 3.39	Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	Penatausahaan	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.3 3.40	Perencana dan Pihak Ketiga	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pemantauan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	Penatausahaan	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.3 3.41	PPTK dan Pihak Ketiga	- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen. Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Pertanggungjawaban	Pelanggaran WNA	ROO.25.05 .33.15	Kepala Bidang	Terjadi pelanggaran oleh WNA tersebut	Eksternal	UC	- Kerusakan Citra Daerah - Stereotipe negatif: Tindakan melanggar hukum oleh WNA dapat memperkuat stereotype negatif terhadap negara asal mereka dan secara tidak langsung juga dapat mencoreng citra Daerah di mata dunia. - Menurunnya minat wisatawan:	Masyarakat Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Pertanggungjawaban	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.05 .33.16	Kepala Bidang	Masih terjadi kesalahan dalam dokumen SPJ	Internal	C	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar

Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Pertanggungjawaban	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.3 3.42	Kasubag Umum dan Keuangan	adanya intervensi oleh pihak-pihak tertentu dalam proses pengadaan barang/jasa	Eksternal	C	adanya potensi gratifikasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Pertanggungjawaban	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.3 3.43	Perencana dan Bendahara Pengeluaran	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Pertanggungjawaban	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.3 3.44	Perencana dan Pihak Ketiga	Anggaran belanja dipergunakan untuk kepentingan pribadi	Internal & Eksternal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Pertanggungjawaban	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.3 3.45	PPTK dan Pihak Ketiga	- Faktor Internal Kurangnya integritas: Individu yang memiliki integritas yang rendah cenderung lebih mudah melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti memalsukan dokumen. Kesempatan: Adanya kesempatan untuk melakukan	Internal	C	Kegiatan tersebut, berpotensi merugikan daerah	Pemerintah Kota Denpasar

Denpasar, 3 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar



Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
Pembina Tingkat II/IVa
NIP. 19720313 199603 1 002



**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis Pemda					
1	Masih terjadinya kasus konflik sosial di Kota Denpasar	RSP.25.05.33.01	4	4	16
2					
II Risiko Strategis OPD					
Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar					
1	Munculnya ideologi anti Pancasila	RSO.25.05.33.01	3	3	9
2	Keterlambatan dalam proses pencairan dana bantuan keuangan partai politik	RSO.25.05.33.02	3	3	9
3	Data Organisasi Kemasyarakatan tidak lengkap	RSO.25.05.33.03	3	3	9
4	Sosialisasi terkait bahaya narkoba tidak dapat menjangkau seluruh SMP yang ada di Kota Denpasar	RSO.25.05.33.04	3	3	9
III Risiko Operasional OPD					
Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar					
1	Administrasi kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.05.33.01	3	3	9
2	Tidak tersusunnya perencanaan yang sesuai dengan kinerja OPD	ROO.25.05.33.02	3	3	9
3	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.33.01	3	4	12
4	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.33.02	3	3	9
5	Pemerasan pada pihak ketiga	RF.25.05.33.03	3	2	6
6	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.33.04	3	2	6
7	Kesalahan Hitung Gaji	ROO.25.05.33.03	2	2	4
8	Gratifikasi dalam proses kenaikan gaji berkala	RF.25.05.33.05	3	4	12
9	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.33.06	3	4	12
10	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.33.07	3	3	9
11	Pemerasan pada pihak ketiga	RF.25.05.33.03	3	2	6
12	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.33.09	3	2	6
13	Ketidaktepatan dalam Penganggaran	ROO.25.05.33.04	3	3	9
14	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.33.10	2	2	4
15	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.33.11	3	4	12
16	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.33.12	3	3	9
17	Pemerasan pada pihak ketiga	RF.25.05.33.13	3	2	6
18	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.33.14	3	2	6
19	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.25.05.33.05	3	3	9
20	List belanja barang/jasa pada RKA tidak ada pada perwali SHB/SBJ	ROO.25.05.33.06	3	3	9

21	List barang pada RKBMD tidak lengkap	ROO.25.05.33.07	3	3	9
22	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.33.15	2	2	4
23	Bekerjasama dengan pihak ketiga agar bisa terlibat dalam penyusunan Standar Satuan Harga	RF.25.05.33.16	3	3	9
24	Pemanfaatan Barang Milik Daerah berpotensi terjadi kecurangan	RF.25.05.33.17	3	3	9
25	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.33.18	3	2	6
26	Keterlambatan pencairan gaji non ASN	ROO.25.05.33.08	2	3	6
27	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.33.19	3	4	12
28	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.33.20	3	3	9
29	Pemerasan pada pihak ketiga	RF.25.05.33.21	3	2	6
30	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.33.22	3	2	6
31	Keterlambatan dalam proses pemeliharaan barang yang tidak sesuai jadwal	ROO.25.05.33.09	2	3	6
32	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.33.23	3	4	12
33	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.33.24	3	3	9
34	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.33.25	3	2	6
35	Hujan saat pelaksanaan Hut Kota & Hut R.I	ROO.25.05.33.10	3	3	9
36	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.05.33.11	3	3	9
37	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.33.26	2	2	4
38	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.33.27	3	4	12
39	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.33.28	3	3	9
40	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.33.29	3	2	6
41	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.05.33.12	3	3	9
42	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.33.30	2	2	4
43	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.33.31	3	4	12
44	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.33.32	3	3	9
45	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.33.33	3	2	6
46	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.05.33.13	3	3	9
47	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.33.34	3	4	12
48	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.33.35	3	3	9
49	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.33.36	2	2	4
50	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.33.37	3	2	6
51	Terjadi keterlambatan dalam proses SPJ Barng dan Jasa	ROO.25.05.33.14	3	3	9
52	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.33.38	2	2	4
53	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.33.39	3	4	12
54	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.33.40	3	3	9

55	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.33.4 1	3	2	6
56	Pelanggaran WNA	ROO.25.05.33 .15	4	3	12
57	Administrasi Bidang tidak terselesaikan tepat waktu	ROO.25.05.33 .16	3	4	12
58	penerimaan dalam bentuk apapun dalam rangka pemilihan penyedia	RF.25.05.33.4 2	4	3	12
59	Kesalahan dalam penyajian Dokumen Perencanaan	RF.25.05.33.4 3	3	4	12
60	Penggelembungan Biaya	RF.25.05.33.4 4	4	3	12
61	Pemalsuan Dokumen	RF.25.05.33.4 5	3	4	12

Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,



Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
Pembina Tingkat II/IVa
NIP. 19720313 199603 1 002

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian	: 2025					
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis Pemda						
1	Masih terjadinya kasus konflik sosial di Kota Denpasar	RSP.25.05.33 .01	16	Kepala Badan Kesbangpol	Penyebab Kenaikan Konflik Sosial Konflik sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Namun, peningkatan frekuensi dan intensitas konflik dalam beberapa tahun terakhir telah	Dampak Peningkatan Konflik Sosial di Daerah antara lain : - Kerugian Materil - Kerugian Immaterial - Dampak Lingkungan
II Risiko Strategis OPD						
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
1						
III Risiko Operasional OPD						
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
1						

Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Denpasar,



Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.

Pembina Tingkat I/IVa

NIP. 19720313 199603 1 002

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda						
1	Masih terjadinya kasus konflik sosial di Kota Denpasar	RSP.25.05.33.01	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 2. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 28C dan 28D yang mengatur tentang hak asasi manusia. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Mengatur tentang perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. 4. Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.	Belum dibentuknya Tim Penanganan Konflik Sosial	Membentuk Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Denpasar	Kepala Badan Kesbangpol	Triwulan III & IV Tahun 2025
II	Risiko Strategis OPD						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
III	Risiko Operasional						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						

Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,
Anak Agung Nourah Gede Darma Putra Atmadia, S.E.Pembina Tingkat I/IVa
NIP. 19720313 199603 1 002

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketert
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	I Risiko Strategis						
1	Membentuk Tim Penanganan Konflik Sosial Kota Denpasar	- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Anggota Tim Penanganan Konflik Sosial	Triwulan III & IV Tahun 2025	Triwulan III & IV Tahun 2025	-
	II Risiko Strategis OPD						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
	III Risiko Operasional						
	Nama OPD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						

Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,

 Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.


Pembina Tingkat I/IVa

NIP. 19720313 199603 1 002

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali				
Tahun Penilaian	:	2025				
Tujuan Strategis	:	Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat				
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Masih terjadinya kasus konflik sosial di Kota Denpasar	Sosialisasi dan ikut terlibat setiap ada terjadi konflik sosial di Kota Denpasar	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Triwulan III & IV Tahun 2025	Triwulan III & IV Tahun 2025	
2						

Denpasar, 3 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Denpasar,


Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
Pembina Tingkat I/IVa
NIP. 19720313 199603 1 002



PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Pengendalian Terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	Risiko Strategis Pemda									
1	Masih terjadinya kasus konflik sosial di Kota Denpasar	RSP.25.05.33.01	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Risiko Strategis OPD									
III	Risiko Operasional OPD									

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

Denpasar, 3 Januari 2025
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Denpasar,

Anak Agung Ngurah Gede Darma Putra Atmadja, S.E.
 Pembina Tingkat I/IVa
 NIP. 19720313 199603 1 002

